

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN  
DANAU KEMBAR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERZINAAN**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**ANNISA MIRTA**

**2010012111232**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Ace  
29  
24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 01/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg: 01/PID/02/II-2024**

Nama : Annisa Mirta  
NPM : 2010012111232  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum**

**(Pembimbing)**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Bagian**

**Universitas Bung Hatta**

**Hukum Pidana**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H )**

# PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERZINAAN

Annisa Mirta<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [annisamirta2000@gmail.com](mailto:annisamirta2000@gmail.com) [pratimaratri@bunghatta.ac.id](mailto:pratimaratri@bunghatta.ac.id)

## ABSTRACT

*Minangkabau Customary Law defines adultery is "a sexual bond between a man and a woman do not yet have a legal marriage bond between the two". Adultery is prohibited based on Article 5 of West Sumatra Province Regional Regulation Number 11 of 2001 about Prevention and Eradication of Immorality. One of the cases of adultery that occurred was in Nagari Kampung Batu Dalam, Danau Kembar District, which was committed by a teenager 4 years ago. Research problems: (1) What is the role of KAN in tidy up adultery cases in Nagari Kampung Batu Dalam, Danau Kembar District? (2) What are the obstacles faced by KAN in resolving the adultery case in Nagari Kampung Batu Dalam, Danau Kembar District? This type of research is sociological juridical. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include conducting interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. Research results: (1) The role of the Nagari Traditional Council in resolving adultery cases is as an advisor and opinion giver to Mamak Korong regarding the adultery case committed by her niece's daughter. (2) The obstacles faced by the Nagari Traditional Court in resolving adultery cases include law enforcement factors, community factors, cultural factors, low participation of urang ampek jinih, limited economic resources, and the lifestyle of teenagers.*

**Keywords:** Role, Nagari Traditional Density, Adultery.

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adat Minangkabau mempunyai pedoman ajarannya yaitu "alam takambang jadi guru", artinya setiap individu Minang harus dapat memahami segala fenomena, gejala-gejala alam dengan segala hukumnya untuk dijadikan pedoman dalam hidup dan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Zina menurut hukum adat merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya atau belum ada ikatan yang sah diantara

keduanya.<sup>2</sup> Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan.
- 2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat.

---

<sup>1</sup> Zulherman Idris, 2000, *Hukum Adat Lembaga-Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya: Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tidak Tertulis*, Cetakan ke-2, UIR Press, Jakarta, hlm. 23.

---

<sup>2</sup> Razali, 2014, 'Data Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam', Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, hlm. 26.

- 3) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, dan narasi, dan dalam bentuk lainnya.

Kasus perzinaan yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar adalah suatu perbuatan yang tidak disukai masyarakat karena perbuatan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kasus perzinahan yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar untuk penyelesaiannya diserahkan kepada pemuka adat nagari yang terdiri dari ketua adat nagari, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penerapan hukuman bagi pelaku zina di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar menarik untuk diteliti. Seperti kronologis yang terjadi di Jorong Kampung Batu Selatan, Kenagarian Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar 4 tahun yang lalu yang mana kedua pelaku merupakan dua remaja (lelaki dan perempuan) yang diamankan oleh warga Jorong Kampung Batu Selatan, di mana sebelum penangkapan salah satu warga mengadukan perbuatan kedua pelaku yang tidak terpuji tersebut ke keluarga dari pihak perempuan, lalu keluarga dari pihak perempuan menghubungi mamak untuk memproses kasus tersebut. Mamak dari pelaku zina perempuan pun menghungi keluarga dan mamak dari pelaku zina laki-laki untuk memproses kasusnya. Tindak lanjut dari kasus zina tersebut si pelaku zina dinikahkan dan diasingkan dari kampung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERZINAAN.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar?

2. Apakah kendala yang di hadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar?
2. Untuk menganalisis kendala yang di hadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis.<sup>3</sup>
2. Sumber Data Penelitian  
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan studi dokumen.
4. Teknis Analisis Data  
Teknis analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan**

Di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Nagari menyatakan peranan serta hak dari kerapatan adat nagari. Pada Pasal 7 Angka (1) menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki tanggungan di bawah ini:

- a. Kapalo Nagari bertanggungjawab dalam pengawasan agar

---

<sup>3</sup> Muhammad Saing, 2013, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, 21 Januari 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

terselenggaranya pemerintahan nagari.

- b. Kapalo Nagari bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan nagari.
- c. Menyepakati dan membahas rencana aturan nagari terkait APBN.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah: “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri pada 22 Oktober 1983 No. 140.23-868, tentang “Nagari” sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Ediwarman, Dt. Panduko Sutan menyebutkan bahwa terakait kasus zina yang ada di Nagari tersebut kasusnya diselesaikan berdasarkan ‘salasai di lapiak nan sahalai’ yang berarti hanya diselesaikan oleh mamak Korong saja, adapun peran KAN disini hanyalah sebagai penasehat dan pemberi pendapat pada mamak Korong terterkait kasus zina yang dilakukan oleh anak kemenakannya. Ini terjadi dikarenakan menurut ketua KAN di Nagari tersebut dapat dikatakan sebagai aib keluarga, sehingga kebanyakan kasusnya disembunyikan dan hanya mamak dari pelaku sajalah yang menyelesaikannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Panggabean, 2020, Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara, Edisi Digital, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 271.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ediwarman, Dt. Panduko Sutan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, 20 Desember 2023.

### Data Kasus Zina di Nagari Kampung Batu Dalam, Kec. Danau Kembar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku	Bentuk Tindakan
1	2019	2	Remaja	Dinikahkan
2	2020	1	Remaja	Dinikahkan
3	2021	0	-	-
4	2022	0	-	-
5	2023	1	Remaja	Dinikahkan

Sumber: Data Primer

Wawancara dengan Ninik Mamak  
Nagari Kampung Batu Dalam  
Kecamatan Danau Kembar, 2023.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kasmir, Siak Marajo selaku Ninik Mamak mengenai peranan KAN, beliau menyebutkan bahwasanya peran KAN sangatlah penting dalam mengatasi kasus perziniaan. Dimana KAN merupakan lembaga adat yang dapat memberikan pengarahan dan pengayoman kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memerintahkan Ninik Mamak untuk dapat memberikan arahan kepada kemenakannya dalam bertindak dan berlaku sesuai dengan anjuran agama dan anjuran adat sebagai mana mestinya.

#### **B. Kendala yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dalam Menyelesaikan Kasus Perziniaan**

Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus perziniaan menurut Darlis, Malin Sutan selaku Ninik Mamak meliputi:

1. Faktor penegak hukum..
2. Faktor masyarakat.
3. Faktor budaya.
4. Rendahnya partisipasi *urang ampek jinih* (Penghulu, Malin, Manti, Dubalang, Malin).
5. Sumber Daya Ekonomi yang terbatas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan KAN Kampung Batu Dalam;
6. Gaya hidup anak remaja yang kebarat-baratan yang mudah terpengaruh oleh budaya lokal, sehingga kesulitan untuk diberi nasehat.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dalam mengatasi kasus perzinahan berperan sebagai pemberi nasehat dan pemberi pendapat pada Mamak Korong terkait kasus zina yang dilakukan oleh anak kemenakannya. Kasus zina yang terjadi di Nagari tersebut dapat diselesaikan berdasarkan 'salasai di lapiak nan sahalai' yang berarti hanya diselesaikan oleh Mamak Korong saja.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menanggulangi kasus zina di Nagari tersebut dapat berupa:
  - a. faktor penegak hukum;
  - b. faktor masyarakat
  - c. Faktor budaya;
  - d. Rendahnya partisipasi urang ampek jinih (Penghulu, Manti, Dubalang, Malin);
  - e. Sumberdaya ekonomi yang terbatas;
  - f. Gaya hidup anak remaja yang kebarat-baratan;

### B. Saran

1. Agar Ninik Mamak dan masyarakat setempat dapat mengaktifkan kembali pendidikan karakter sejak dini seperti didikan subuh setiap hari minggu pagi, pesantren Ramadhan, dan kegiatan keagamaan lainnya.
2. Agar Ninik Mamak dapat membimbing remaja nagari untuk menjauhi perbuatan zina.
3. Agar KAN dapat melakukan penyuluhan kepada remaja nagari untuk menjauhi perbuatan zina dan mengawasi anak nagari.
4. Agar remaja aktif kembali dalam kegiatan Remaja Masjid

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Edisi

Digital, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Zulherman Idris, 2000, *Hukum Adat Lembaga-Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya: Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia* Ynag Tidak Tertulis, Cetakan ke-2, UIR Press, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

### C. Sumber Lain

Muhammad Saing, 2013, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, 21 Januari 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

Razali, 2014, 'Data Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Islam', Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.